

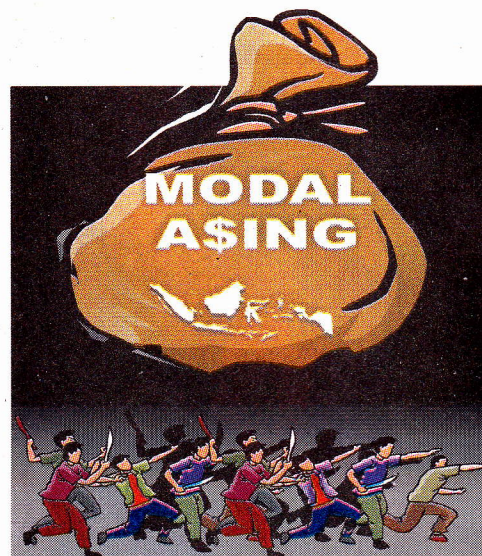
OPINI

Malari dan Kemandirian Ekonomi

Hendra Kurniawan

membuka lebar pintu masuk investasi asing seiring dengan upaya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Melalui UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), investor asing berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia. Kerja sama ekonomi dan bantuan ekonomi dapat segera dirasakan pengaruh positifnya. Upaya stabilitas politik dan ekonomi yang diperjuangkan Orde Baru juga membuahkan hasil. Sayangnya, sejak saat itu pertumbuhan ekonomi lebih didominasi peran modal asing.



KR-JOKO SANTOSO

Hal ini tanpa disadari membuat kedaulatan ekonomi bangsa perlahan lepas dari genggaman.

Konsumerisme dan hedonisme semakin menumbuhsuburkan kekuatan ekonomi asing. Kemandirian ekonomi menjadi jauh panggang dari api. Perekonomian nasional keropos. Sejarah mencatat, pada 15 Januari 1998, tepat 24 tahun setelah Peristiwa Malari, Presiden Soeharto terpaksa menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF akibat krisis ekonomi yang menghantam Indonesia. Tahun 2007, pada masa peme-

rintahan Presiden SBY, belunggu IMF mulai terurai.

Meski demikian kekuatan ekonomi nasional sampai saat ini belum benar-benar kokoh. Penguasaan asing terhadap sektor-sektor perekonomian negara yang penting bagi hajat hidup orang banyak masih terus berlangsung. Modal asing masih mendominasi dalam sektor pertambangan, energi, transportasi, komunikasi, bahkan hingga kebutuhan manusia akan air. Memang benar bahwa kerja sama ekonomi tidak dapat dihindari bahkan diperlukan, namun kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam arti tertentu jelas harus ditegaskan.

Tahun ini tepat 41 tahun Peristiwa Malari dan 17 tahun ditandatanganinya LoI antara Indonesia dengan IMF. Akhir tahun ini pula Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu tujuan diberlakukannya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi yang kuat antarnegara ASEAN. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas produk dalam negeri agar mampu berdaya saing dengan produk asing. Indonesia juga perlu mengubah landscape perekonomian nasional yang konsumtif menjadi berbasis produksi dari yang berskala besar sampai yang kecil. Jika ini terwujud dengan baik maka niscaya kemandirian ekonomi bangsa dapat tercapai.

Pemerintah Jokowi-JK bercita-cita mewujudkan kemandirian ekonomi. Untuk itu pemerintah perlu terus dikawal dan didukung agar berani mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat meski penuh tantangan. Semua pihak perlu menyadari kesejahteraan memang tak bisa dicapai dengan cara cepat dan instan. Bila ada yang lebih senang bernostalgia menghadirkan kembali era ekonomi Orde Baru yang tampak makmur namun rapuh sama artinya dengan mengabaikan sejarah. □ - s.

*) **Hendra Kurniawan MPd**, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

ONTRAN-ONTRAN yang terjadi pada era Orde Baru bukan hanya Peristiwa Mei 1998 yang kemudian mendorong reformasi dan tumbangnya rezim penguasa. Pada awal Orde Baru juga pernah terjadi gejeran politik yang dikenal dengan Peristiwa Malari. Malapetaka 15 Januari 1974 merupakan rusuh politik pertama yang meletus pada era Orde Baru. Malari hanyalah tip of the iceberg, puncak gunung es. Pasca peristiwa ini, Presiden Soeharto memiliki kebijakan-kebijakan tertentu demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi di masa selanjutnya.

Meletusnya Malari dipicu oleh aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974. Penolakan ini berujung pada seruan sikap anti Jepang. Muncullah amuk massa yang entah dari mana datangnya menyasar pada segala hal yang berbau Jepang. Kendaraan buatan Jepang dibakar. Gedung-gedung yang ada hubungannya dengan Jepang, seperti kantor Toyota Astra dihancurkan. Termasuk pabrik dan bangunan milik pemodal asing lain, Coca Cola, tak luput dari incaran massa.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam (2007) mengemukakan data yang didapatnya dari surat kabar. Akibat peristiwa Malari sedikitnya 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Kerugian materi juga tidak kalah banyak, 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak atau dibakar, 144 bangunan mengalami rusak berat, dan sebanyak 160 kg emas dijarah dari sejumlah toko perhiasan.

Gejolak ini timbul akibat perubahan kebijakan ekonomi yang mendasar setelah pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru. Presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri antinekolim. Ditambah dengan semangat deklarasi ekonomi (dekon) yang berdikari, Presiden Soekarno cenderung anti Barat dan mempersempit celah bagi masuknya modal asing. Sebaliknya politik luar negeri Orde Baru lebih kooperatif. Indonesia menjajaki perbaikan hubungan dengan negara lain, menjalin kerja sama, hingga